

Pemberdayaan Politik Santri pada Pilwali di Surabaya

Mohammad Ilham

m_ilhamDT@gmail.com

*SMP Islam Darut Tauhid
Katon Barat, Geger, Bangkalan
Indonesia*

Abstract: The purpose of this paper is to answer the question that relating the practice of political empowerment and its socialization about Pilwali in Surabaya to the students at Pondok Pesantren Sidoresmo. The results of the study inferred that the practice of political empowerment and its socialization to the students are influenced by the study of fiqh siyasah books. Santri's behavior is circumscribed by two factors namely; the first factor is that the Santri's action is very dependent on the political preferences of the kyai due to the patron-client relationship between the kyai-santri. The second factor is the santri's political behavior is not bound by the kyai's political choice as the assumption of the freedom of choice in the political sphere. Pondok Pesantren Sidoresmo is truly empowering students in choosing their political aspirations in the 2005 Pilwali in Surabaya openly and actively without any element of coercion and always adheres to Islamic criteria, in which some scholars consider that the law in electing leaders (mayors) is obligatory, and the law concerning leader's appointment is fard al-kifayah.

Keyword: Politic Santri, Pondok Pesantren Sidoresmo

Abstrak: Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab pertanyaan: "Bagaimanakah praktek pemberdayaan politik dan sosialisasi terhadap santri Pondok Pesantren Sidoresmo dalam kaitannya dengan Pilwali di Surabaya". Hasil dari penelitian ini menyimpulkan praktek pemberdayaan politik dan sosialisasi terhadap santri Pondok Pesantren Sidoresmo dalam kaitannya dengan Pilwali 2005 di Surabaya banyak didapat dari pengajian kitab *fiqh siyāṣah*. Dan prilaku santri di tentukan oleh 2 faktor, yaitu *Pertama*, Prilaku santri sangat tergantung pada pilihan politik kyai karena hubungan patron-klien antara kyai-santri. *Kedua*, prilaku politik santri tidak terikat dengan pilihan politik kyai, hal ini disebabkan adanya anggapan pada santri bahwa mereka memiliki kebebasan pilihan dalam wilayah politik. Pondok Pesantren Sidoresmo

benar-benar memberdayakan santri di dalam memilih aspirasi politik mereka dalam Pilwali 2005 di Surabaya secara bebas dan aktif tanpa ada unsur paksaan dan selalu berpegang pada kriteria-kriteria Islam, di mana sebagian ulama memandang bahwa hukum dalam memilih pemimpin (Walikota) adalah wajib. Dan hukum mengangkat pemimpin adalah *farḍ kifāyah*.

Kata kunci: Politik santri, pondok pesantren Sidoresmo dan Pilwali Surabaya

Pendahuluan

Kata santri dalam khasanah kehidupan bangsa Indonesia dan khususnya umat Islam mempunyai dua makna. Pertama menunjuk sekelompok peserta sebuah pendidikan pesantren atau pondok dan yang kedua menunjuk akar budaya sekelompok pemeluk Islam.¹

Hasrat atau "*syahwat*" politik santri, (meminjam istilah Abdul Munir Mulkhan) yaitu mereka yang aktif dalam gerakan Islam tidak pernah benar-benar padam dalam pergulatan politik sepanjang sejarah negeri ini. Pemisahan gerakan Islam dari dunia politik merupakan penyimpangan ajaran Islam yang mudah dituduh sebagai konspirasi kekuatan anti-Islam. Keduanya tak pernah benar-benar terbebas dari kegiatan politik walaupun menyatakan diri bukan gerakan politik seperti dirumuskan dalam *khittah* masing-masing.²

Fakta politik ini seringkali dipandang sebagai rekayasa dan konspirasi kekuatan anti-Islam yang terus mempersulit perumusan kebijakan politik nasional ketika semua problem politik dilihat sebagai wilayah sakral dan tertutup.

Peran politik santri dalam dinamika politik nasional bisa dikembangkan menjadi lebih produktif. Reposisi tafsir dan ajaran otentik akan membuka dialog dan komunikasi politik santri dengan konstituen dari rakyat pemilih yang

¹ Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: SIPRESS, 1992), 1.

² Abdul Munir Mulkhan, "Syahwat Politik Kaum Santri," diakses 20 Juli 2019, <http://id.shvoong.com/social-sciences/1691896-syahwat-politik-kaum-santri/>.

dalam kategori Geertz-ian tergolong priyayi dan abangan menjadi lebih konstruktif. Melalui proses demikian, aktivis politik santri dan partai Islam mengembangkan kebijakan dan program politik yang lebih memihak kepentingan publik rakyat pemilih.

Dari sini dikembangkan praktik politik santri sebagai transformasi keberagamaan bagi penumbuhan kehidupan politik lebih demokratis dan pemberdayaan kehidupan sosial dan ekonomi mayoritas rakyat yang mayoritas muslim.

Meminjam identifikasi Geertz, kyai dan santri merupakan bagian dari kelompok masyarakat Islam khususnya di pulau Jawa yang memiliki kesadaran keIslaman yang lebih utuh dan lurus dibanding dua kelompok lainnya, *abangan* dan priyayi. Komunitas santri sendiri diidentifikasi Geertz merupakan bentukan komunitas kyai, khususnya melalui lembaga pesantrennya.³

Antara santri dan kyai terdapat sebuah pola relasi emosional, tetapi tanpa struktur dan tingkatan politis yang *sofistikatif* seperti *galibnya* tradisi serupa dalam pemerintahan kerajaan. Kyai dan keluarganya memiliki posisi sosial dan kultural yang tinggi dibanding kebanyakan kaum santri.⁴

Sistem budaya tersebut pada dasarnya merupakan pelembagaan tradisi yang membentuk struktur khas. Basis massa komunitas kyai dan santri bertumpu pada pesantren dan pedesaan di mana kyai menempati posisi sentral dalam perikehidupan sosialnya. Hal ini menjadikan kepemimpinan kyai di kalangan masyarakat santri sejak awalnya mengakar secara kultural. Kyai merupakan kelompok elite secara kultural, sosial, politik maupun ekonomi. Mereka merupakan pengajar agama (*preacher*) yang rata-rata sekaligus pemilik tanah yang luas.⁵

³ Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, 1.

⁴ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Kittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992), 28.

⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3S, 982), 56.

Pada banyak kasus, peran kyai dalam masyarakat pedesaan tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang menyangkut keagamaan.⁶ Masyarakat Islam di sekitar kyai dengan sendirinya akan senantiasa berusaha menyesuaikan pandangan hidup dan perilakunya dengan ketokohan kyai. Kyai menjadi pemimpin informal yang lebih didengar petuah dan keputusannya dibanding tokoh manapun. Peran penting mereka di tengah masyarakat dikarenakan mereka memiliki wibawa, kharisma dan dihormati masyarakat, karena keluhuran akhlaknya.⁷

Status kyai yang tinggi menjadikannya tidak perlu direpotkan oleh pekerjaan sebagai petani karena pengabdian yang tinggi dari para abdi dan masyarakat yang mengerjakan tanahnya. Meski secara formal mereka bukan pejabat pemerintah, namun status sosial mereka cenderung dominan secara kultural. Mereka lebih dihormati dan didengar pendapatnya dibanding aparat pemerintahan, seperti lurah atau kepala desa.⁸

Keterlibatan kyai dengan politik sebenarnya bisa dilacak sejak kedatangan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Para penyebar Islam yang disebut Walisongo menyebarkan agama Islam dengan menggunakan sistem pengajaran yang dinamakan pesantren. Yang fenomenal adalah peristiwa resolusi jihad muncul setelah kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, yang berasal dari fatwa K.H. Hasyim Asy'ari, yang kemudian dikokohkan dalam rapat para ulama NU se-Jawa Madura di Bubutan Surabaya, pada

⁶ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan Publika, 2008), 53.

⁷ Roikhatul Hamidah, "Posisi Ulama dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Perspektif Fiqh Siyasah," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (Desember 2019): 425.

⁸ Nur Syam, "Perilaku Politik Santri dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur," 2007, <http://eprints.sunan-ampel.ac.id/20/>.

tanggal 22 Oktober 1945.⁹ Ini menunjukkan bahwa kiprah kiai dalam perjalanan bangsa ini tidaklah kecil.¹⁰

Selain itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Zamakhsyari Dhofier, para kyai yang sepanjang hidupnya memimpin aktifitas kehidupan keagamaan juga telah memperoleh pengaruh politik.¹¹ Keterlibatan mereka dalam politik karena menurut mereka relasi antara negara dan agama bersifat simbiosis mutualisme. Hubungan keduanya diibaratkan dua sisi mata uang yang berbeda, namun hakikatnya saling berhubungan dan membutuhkan; jika satu sisi dari keduanya tidak ada, maka tidak dianggap sebagai sebuah koin mata uang.¹²

Minimal terdapat dua factor yang mendorong kyai dan lembaganya, yaitu pesantren, terlibat dalam politik. Pertama ingin berpartisipasi dan ikut serta dalam proses pembangunan terutama di daerah. Kedua, adalah agar wilayah dakwah Islam lebih luas jangkauannya mudah jalannya.¹³

Disini penulis melihat bahwa santri sebagai bagian dari komunitas Islam tradisional memiliki responsibilitas tertentu terhadap perilaku politik lokal di sekelilingnya. Pertama, perilaku santri sangat tergantung dengan pilihan politik kyai. Hal ini berkaitan dengan fungsi *patron-klien* antara kyai-santri. Kedua, perilaku politik santri tidak terikat dengan pilihan politik kyai, hal ini disebabkan adanya anggapan pada santri bahwa mereka memiliki kebebasan

⁹ Makinudin, "Resolusi Jihad di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan dalam Al-Qur'an," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (April 2018): 141.

¹⁰ Lewat Islamisasi yang dilakukan oleh para wali, umat Islam akhirnya menjadi mayoritas. Perlawanan fisik dengan menjajah serta pertarungan wacana saat menentukan arah dan bentuk negara, mereka tampil dengan semangat cinta tanah air yang tinggi. Lihat: Ali Maschan Moesa, "Kiai NU dalam Paradigma Politik Kebangsaan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 2, no. 1 (April 2012): 97.

¹¹ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, 58.

¹² Masruhan, "Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara," *Jurnal Al-Qānūn* 12, no. 1 (Juni 2009): 104.

¹³ Abdulla Hubet, "Peran Politik Perempuan Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Dukun Gresik," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (April 2013): 199.

pilihan dalam wilayah politik. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Sidoresmo dalam mensukseskan pilwali 2005 di Surabaya, dalam perspektif *Fiqh Siyāṣah*.

Kondisi inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian secara lebih mendalam guna untuk mengetahui praktek pemberdayaan politik santri PP. Sidoresmo dalam kaitannya terhadap Pilwali 2005 di Surabaya. PP. Sidoresmo telah banyak menghasilkan santri *Mutakharrijīn* yang menjadi Kyai (pengasuh pondok pesantren), sehingga Kyai Pondok Pesantren Sidoresmo bisa dijadikan rujukan aspirasi politik mereka.

Santri dan Politik

Pengertian santri

Pada dasarnya santri mempunyai dua arti. *Pertama*, santri merupakan murid atau orang yang belajar di pondok pesantren.¹⁴ Oleh karena itu, santri merupakan elemen penting dalam suatu lembaga pesantren, walaupun demikian, menurut tradisi pesantren terdapat dua kelompok santri pertama santri mukim yaitu : murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Kedua santri kalong yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren.¹⁵

Kedua, santri sebagai sebutan bagi kelompok orang yang memeluk agama Islam dan tergolong taat dalam memenuhi dan menjalankan ajaran Islam. Biasanya ketaatan itu juga ditunjukkan dengan menjadi atau tergabung sebagai anggota jamaah suatu masjid, pengajian, atau organisasi Islam tingkat lokal atau pun nasional.¹⁶

Santri adalah sebutan bagi murid yang mengikuti pendidikan di pondok pesantren. Pondok Pesantren adalah sekolah pendidikan umum yang persentasi ajarannya lebih banyak ilmu-ilmu pendidikan agama Islam. Kebanyakan

¹⁴ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah* (Surabaya: Khalista, 2007), 140.

¹⁵ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, 51–52.

¹⁶ Abdul Munir Mulkhan, *Moral Politik Santri* (Jakarta: Erlangga, 2003), 300.

muridnya tinggal di asrama yang disediakan di sekolah itu. Pondok Pesantren banyak berkembang di Pulau Jawa. Panggilan Santri Pondok X artinya ia pernah/lulus dari Pondok Pesantren X.

Menakar hubungan santri dan kyai

Para kyai dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam, sering kali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, sehingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk-bentuk pakaian yang merupakan symbol kealiman yaitu kopiah dan surban.¹⁷

Sebaliknya, sebagai seorang murid, santri merupakan elemen dalam tradisi pesantren yang kedudukannya lebih rendah dari kyai. Sebagai pengikut, santri harus senantiasa taat, *tawadu'* dan hormat kepada gurunya. Santri dalam kehidupan sehari-harinya harus senantiasa mengikuti apa yang dititahkan oleh seorang kyai.

Mengapa santri harus tunduk dan patuh pada kyai? Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa kyai merupakan sumber ilmu pengetahuan di pesantren dan penjaga moral santri, sehingga tidak patuh terhadap kyai berarti mereka telah merusak tradisi pesantren yang telah dibangun ratusan tahun lamanya, dan hal ini akan dianggap sesuatu yang tidak wajar.

Bagaimanapun, arus modernisasi sebagaimana disinggung di atas telah sedikit banyak membawa pergeseran pada peran kyai dan santri di pesantren sehingga kultur yang selama ini tumbuh subur kemudian mengalami degradasi akibat perkembangan global.

Perubahan relasi kyai-santri dapat kita lihat dalam ketundukan seorang santri yang mulai berkurang sebagai akibat oleh bergesernya peran kyai di dalam pesantren maupun masyarakat. Sosok kyai yang dahulu disegani dan

¹⁷ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, 56.

berpengaruh karena memiliki kharisma yang jarang dimiliki orang lain, mulai bergeser ketika mereka merambah ke wilayah politik dengan ikut berperan dalam kegiatan politik praktis.¹⁸

Pada sisi yang lain, seiring dengan demokratisasi di Indonesia dan kesempatan pendidikan yang tinggi oleh santri, banyak komunitas santri yang mulai tercerahkan. Hal ini bisa kita lihat dari cara berpikir mereka yang semakin kritis, independen dan kreatif. Hal ini ternyata berimbas terhadap hubungan kyai-santri yang tidak lagi seperti dahulu di mana saat ini santri telah berani mengkritisi apapun yang dilakukan kyainya yang dianggap melenceng.

Kharisma yang dianggap sebagai senjata ampuh untuk mempengaruhi santri juga pada tataran tertentu tidak lagi menemukan relevansinya pada saat sekarang. Sehingga praktis, kyai sekarang sudah mulai kehilangan pengaruhnya akibat perannya dalam politik praktis. Konflik Gus Dur-Muhaimin dalam tubuh PKB bisa kita analogikan sebagai salah satu contoh melenturnya hubungan kyai-santri sebagai akibat cara berfikir logis dalam kerangka rasionalitas, yang menjadi faktor penting dalam memutuskan sesuatu dalam hubungan kekerabatan sebagai dominasi pengaruh kharismatik seseorang.¹⁹

Santri dalam kancah politik Indonesia

Perpolitikan kaum santri masih merupakan persoalan yang penting di lakukan, terutama bagi pengembangan kebijakan dan strategi budaya bagi politik santri dalam memenangkan tujuan-tujuan besar politik bagi kepentingan Islam yang lebih universal dan bagi kepentingan kemanusiaan dan bangsa yang lebih luas. Faktor politik ini bisa dilihat dari perolehan suara partai-partai Islam dalam pemilu 1955 sehingga pemilu terakhir pada tahun 1999, bahkan juga dalam sidang BPUPKI

¹⁸ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 263–65.

¹⁹ Fathuri, "Hubungan Santri dan Kyai," diakses 20 Juni 2018, <http://islamlib.com/id/index.php?Page=article&id=626>.

menjelang kemerdekaan tahun 1945.²⁰ Dari kritik internal itulah mungkin bisa dikembangkan pemahaman yang jujur, mengapa politik kaum santri selalu gagal memperoleh simpati mayoritas pemilih.

Kaum abangan dan santri tradisionalis, pada umumnya tinggal di kawasan pedesaan sebagai petani miskin atau di kawasan perkotaan sebagai buruh dengan tingkat pendidikan relative rendah. Mereka hidup di kawasan dekat kegiatan dunia pertanian, bantaran sungai, kawasan sekitar pasar, tempat keramaian di pusat kota, kawasan terminal angkutan umum atau di sekitar stasiun kereta api. Pola perilaku keagamaan setiap kelompok pemeluk Islam ini berbeda-beda yang kemudian bias dilihat dari pilihan politik sebagaimana bisa dibaca dari sejarah politik Indonesia.²¹

Era reformasi tidak hanya menjadi awal bagi bangsa ini untuk menapaki masa baru yang lebih dinamis, namun juga mampu menghadirkan suatu kondisi di mana ruang publik dapat dimasuki seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali kalangan ulama dan tokoh-tokoh sipil yang sebelumnya, eksistensinya nyaris terpinggirkan di setiap proses pengambilan keputusan politik maupun pelaksanaan pemerintahan di masa Orde Baru.²²

Jadi, pentingnya kesadaran bagi kaum santri bahwa tujuan jangka pendek yang bersifat praktis dari kegiatan politik adalah merebut simpati publik pemilih. Tujuan ideal selalu perlu diletakkan sebagai kritik atas capaian tujuan praktis tentang untuk apa sebenarnya sebuah kekuasaan politik atau pun keberlakuan syari'at yang selama ini menjadi idiologi politik santri.

Sekarang sudah seharusnya Islam tidak perlu di tempatkan pada posisi simbol identitas agama dalam politik santri, tetapi lebih sebagai nilai etik dari perjalanan sejarah agama-agama dan sejarah peradaban. Umat Islam, sebagai

²⁰ Mulkhan, *Moral Politik Santri*, 289.

²¹ Mulkhan, 56.

²² Hamidah, "Posisi Ulama dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Perspektif Fiqh Siyasah," 425.

bagian integral dari manusia secara general, mau atau tidak, pasti bersentuhan, baik secara pasif maupun aktif, dengan dunia politik dan pemerintahan karena keduanya merupakan bagian yang tak terhindarkan dari hidup dan kehidupan.²³

Di sisi lain dalam kondisi bangsa yang memprihatinkan sekarang, waktunya sudah sangat tepat. Lebih jelasnya golongan santri tidak boleh lagi bermain di wilayah pinggir sejarah, turut menari menurut irama genderang yang di tabuh pihak lain. Oleh sebab itu, kita perlu menyiapkan para pemain yang handal, berakhlak mulia, profesional dan punya integritas pribadi yang tangguh dan prima.

Apalagi, menurut Masruhan, bahwa relasi antara negara dan agama bersifat simbiosis mutualisme. Hubungan keduanya diibaratkan dua sisi mata uang yang berbeda, namun hakikatnya saling berhubungan dan membutuhkan; jika satu sisi dari keduanya tidak ada, maka tidak dianggap sebagai sebuah koin mata uang.²⁴

Makinuddin menambahkan bahwa dalam pandangan Islam, keharusan adanya negara merupakan konsekuensi logis dari tuntutan menjalankan aturan-aturan syariat yang tidak mungkin terlaksana tanpa adanya negara. Hal ini karena menjalankan aturan-aturan syara' hukumnya adalah wajib, maka keberadaan negara sebagai instrumen untuk itu hukumnya juga wajib.²⁵

Pemberdayaan politik Santri Sidoresmo terhadap Pilwali di Surabaya ***Pondok Pesantren Sidoresmo***

Komplek pondok pesantren Sidoresmo terletak $\pm$ 2 km di sebelah timur stasiun Wonokromo. Secara geografis dapat di gambarkan sebagai berikut:

²³ Idri, "Sistem Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif Abū al-A'lā al-Maudūdī," *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008): 94.

²⁴ Masruhan, "Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara," 104.

²⁵ Makinudin, "Resolusi Jihad di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan dalam Al-Qur'an," 138.

1. Sebelah utara dibatasi dengan kampung Sidoresmo Gg.7
2. Sebelah selatan dibatasi dengan perumahan Sidosermo PDK
3. Sebelah timur dibatasi dengan perumahan Sidosermo Indah
4. Sebelah barat dibatasi dengan desa Jagir Sidosermo Indah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa komplek pondok pesantren Sidoresmo ini terletak di tengah-tengah Kota Surabaya bagian Selatan.

Letak komplek pondok pesantren yang berada di tengah-tengah Kota, tidak berpengaruh terhadap kehidupan keagamaan masyarakat di Sidoresmo. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya lembaga-lembaga pondok pesantren di lingkungan tersebut.

Pondok Pesantren di Sidoresmo ini berjumlah lebih dari 20 buah pondok pesantren. Namun di antara 20 tersebut dipilih 8 pondok pesantren sebagai objek penelitian, antara lain:

1. Pondok Pesantren Islam At-Tauhid dengan pengasuh KH. Mas Mansur Tholhah, dengan jumlah santri sekitar 350 orang santri.
2. Pondok Pesantren Salafiah An-Najiah dengan pengasuh KH. Mas Yusuf Muhajir dengan jumlah santri sekitar 250 orang santri
3. Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah dengan pengasuh KH. Mas Imam Syafi'i dengan jumlah santri sekitar 50 orang santri
4. Pondok Pesantren Al-Haqiqi Joyonegoro dengan pengasuh KH. Mas Lukman dengan jumlah santri sekitar 100 orang santri.
5. Pondok Pesantren Al-Badar dengan pengasuh KH. Mas Muhammad Nur dengan jumlah santri sekitar 45 orang santri.
6. Pondok Pesantren Yanabi'ul Ulum wal Hikam dengan pengasuh KH. Mas Chotib Akhsan dengan jumlah santri sekitar 150 orang santri

7. Pondok Pesantren Islam At-Taqowiyah dengan pengasuh KH. Mas Rosul dengan jumlah santri sekitar 50 oarang santri.

Kecendrungan politik santri

Kesenjangan kemampuan mengatasi tantangan hidup dan kesulitan yang dihadapi antar satu dan lain kelompok dalam masyarakat akan menimbulkan perbedaan sikap diantara kelompok tersebut. Perbedaan tersebut merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya polarisasi dan konflik antar sub kelompok atau antar kelompok dalam masyarakat Islam.²⁶

Dengan demikian, apabila sikap sosial adalah fungsi dari kepentingan, maka terjadi suatu konflik sosial adalah akibat dari perbedaan kemampuan memenuhi kepentingan tersebut. Dalam tradisi kehidupan sosial di lingkungan umat Islam, hirarki wewenang dan status sosial dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan keIslaman seseorang dan kemampuan orang tersebut yang disebut ulama dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan pengetahuannya tersebut kepada umat dan masyarakat. Ulama, sebagai elite santri adalah orang yang memiliki status sosial dengan suatu kedudukan yang tinggi dalam struktur masyarakat Islam.

Struktur hubungan sosial antara elite santri dengan anggota masyarakat atau umat pengikut muncul dan tumbuh dari proses hubungan berdasarkan pengalaman keagamaan dan emosi keagamaan. Sifat hubungan yang demikian merupakan daya perekat dan pembentuk solidaritas keagamaan sebagai infrastruktur tata kehidupan sosial umat. Proses interaksi dan sosialisasi demokrasi politik santri tersebut secara tradisional terpelihara melalui kegiatan sosialisasi Islam misalnya diperkenalkan ide-ide demokrasi dalam Tata Negara (*Fiqh siyasa*) serta pengajian dan khutbah –khutbah.

²⁶ Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, 47.

Perubahan kehidupan masyarakat secara berangsur dan bertahap mengakibatkan pergeseran fungsi ulama dalam proses sosialisasi dikalangan umat. ternyata tidak hanya diperoleh dari gerakan sosialisasi Islam tradisional yang dilakukan oleh para ulama tersebut.

Modernisasi dakwah dan pendidikan Islam dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan agama disekolah umum tidak hanya mengubah basis sosio-kultural dan pengetahuan elite santri akan tetapi secara luas juga ummat Islam pada umumnya. Elite santri dan ulama yang semula tumbuh dan berkembang dari sistem pendidikan pesantren, kemudian tumbuh dan berkembang dari system pendidikan modern dan media sosialisasi Islam lainnya. Keadaan tersebut menyebabkan perubahan hubungan ulama atau elite santri dengan pengikutnya. Hubungan emosi keagamaan diantara mereka mulai terbuka dan mencair, bersifat rasional dan fungsional.

Penulis melihat bahwa perilaku politik santri pondok pesantren Sidoresmo dalam kaitannya dengan pilwali 2005 di Surabaya sangat tergantung dengan pilihan politik kiainya. Hal ini berkaitan dengan fungsi *patron-klien* antara kiai-santri. Dan sebagian perilaku politik santri yang tidak terikat dengan pilihan politik kiainya, hal ini disebabkan adanya anggapan pada santri bahwa mereka memiliki kebebasan pilihan dalam wilayah politik. PP. Sidoresmo telah banyak menghasilkan santri *Mutakharrijin* yang menjadi Kyai, sehingga Kyai pondok pesantren Sidoresmo bisa dijadikan rujukan aspirasi politik mereka.

Proses ketergantungan politik santri

Perubahan polarisasi umat Islam dapat dilihat dalam perubahan perilaku politik dan keagamaan. Hal tersebut berhubungan dengan perubahan kecenderungan pilihan kerja. Kecenderungan sikap akibat memilih bidang kerja sebagai pegawai pemerintah dikalangan santri berbeda dengan bidang kerja di sektor pertanian dan wiraswasta merupakan faktor dominan fenomena perubahan perilaku politik santri. Kecenderungan ini telah menimbulkan proses

ketergantungan birokratik dan politik pemerintah yang sedang berkuasa.²⁷

Modernisasi pendidikan Islam, disamping melahirkan generasi baru intelektual dan akademis dengan wawasan pemikiran dan hubungan yang luas dan spesialisasi pekerjaan, juga menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi sosial generasi baru tersebut. Pada sisi lain pemanfaatan teknologi informasi-komunikasi dalam gerakan sosialisasi Islam menyebabkan berkurangnya peranan individual elite santri sebagai referensi sosial. Hubungan sosial diantara elite dengan pengikutnya yang didasarkan ikatan berdasar emosi keagamaan kemudian mencari dasar-dasar rasional dan bersifat terbuka dan fungsional. Ketergantungan politik santri PP Sidoresmo sering dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan aspirasi politik santri.

Santri dan Politik: Implikasi dalam Perilaku Memilih pada Pilwali 2005 di Surabaya

Dunia santri adalah sebuah komunitas yang sarat dengan variasi karakter. Jika merujuk pada kamus bahasa Indonesia, akan ditemukan definisi santri sebagai orang-orang yang menuntut ilmu-ilmu agama Islam. Secara khusus, *mu'asyarah* tersebut tidak akan pernah terlepas dari fenomena-fenomena umum yang muncul dalam dunia *konvensional*. Terhadap panggung perpolitikan, misalnya, seorang santri tidak bersikap acuh tak acuh, karena politik bersifat global yang menjalari setiap matra kehidupan, termasuk kehidupan santri. Walaupun dalam frekuensi kecil dan tidak langsung, peran santri tidak dapat dikecilkan apalagi dikucilkan begitu saja.²⁸

Sekarang yang perlu dipikirkan seorang santri adalah peran dan upaya untuk melakukan pemilihan dan rekrutmen wakil-wakil rakyat periode selanjutnya. Tentu saja dalam koridor kesantrian yang sarat dengan nilai Islaminya. Dunia yang berhubungan langsung dengan kultur

²⁷ Mulkhan, 52-53.

²⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Presiden dan Wakil Rakyat Pilihanku: Visi Kepemimpinan Santri 2004* (Yogyakarta: Qirtas, 2003), 12.

budaya Islami.²⁹ Meski terkesan hidup, dunia pesantren mau tidak mau harus diakui sebagai 'induk' yang banyak menelorkan orang menjadi manusia. Karena selama ini dari berpuluh juta penghuni Indonesia hanya segelintir saja yang berupa manusia.

Santri dan pesantren harus tanggap terhadap fakta perpolitikan Indonesia yang beragam dan butuh pemikiran yang mendalam. Apalagi yang berkaitan dengan penentuan seorang *umara'* yang ideal. Seorang santri yang peduli kepada keharmonisan rumah tangga negara tidak akan memilih seorang pemimpin yang tidak loyal. Apalagi menjadikan seorang pemimpin yang menebarkan hasutan guna memperoleh dukungan rakyat. Dukungan yang diperoleh dengan mengorbankan kaum minoritas.³⁰ Selain itu, tidak sedikit ayat al-Quran yang menyinggung masalah ini meskipun pada tataran global dan interpretatif sehingga memunculkan ide-ide tentang politik dan pemerintahan yang beragam di kalangan intelektual muslim.³¹

Sedangkan menurut Ibrahim Hosen ketika memperhatikan bagaimana hukum Islam di Indonesia dapat berjalan dengan efektif, berpendapat bahwa negara menjadi faktor utama untuk merealisasikannya. Karena negara yang mempunyai otoritas terlaksananya hukum Islam.³²

Maka dalam konteks ini, sesuai dengan substansi kepesantrenan dengan komitmen yang sarat dengan muatan religi, di Pondok Pesantren Sidoresmo mempunyai sosok kiai yang mumpuni, ada kitab kuning, *fiqh siyasah* serta *Islamic building* yang intens pada *'izzul Islam wal muslimin*. Sehingga seorang santri tidak akan berbuat ceroboh dalam menentukan pemimpin yang baik. Karena seorang pemimpin merupakan barometer keberhasilan dan

²⁹ Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 60–61.

³⁰ Asmani, *Presiden dan Wakil Rakyat Pilihanku: Visi Kepemimpinan Santri 2004*, 14.

³¹ Idri, "Sistem Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif Abū al-A'la al-Maudūdy," 94.

³² Muh. Sholihuddin, "Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyasah KH. Ibrahim Hosen)," *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 1 (Juni 2010): 164.

'*kadigdayan*' sebuah bangsa. Bukan pemimpin cengeng dan sok pinter yang menjadi pilihan seorang santri.

Berbagai daya upaya akan dilakukan santri PP. Sidoresmo untuk menjaring seorang calon pemimpin. Sketsa penjaringan tanpa mengabaikan sifat hebat yang sudah menjadi kodrat manusia. Karena bagaimanapun subjektivitas itu akan tetap hadir ketika dihadapkan pada suatu dilema, walau dalam skala kecil. Tinggal pandai-pandai kita saja memelihara sifat itu. seorang santri yang jeli akan menatap seorang calon yang dinilai pantas untuk menjadi pemimpin. Sejauh mana gerak geriknya di masa lampau. Karena hal itu akan dijadikan standar penilaian kelayakan seseorang untuk memimpin. Seorang calon pemimpin yang mempunyai *background* diri yang baik lebih layak untuk menjadi pemimpin. Apalagi yang dilatar belakangi kehidupan dengan status *cum laude*. Tapi bukan hanya itu, calon pemimpin yang baik haruslah mampu membuat hati rakyat senang.

Masih banyak sudut-sudut lain yang perlu mendapatkan sorotan. Beberapa diantaranya:

Pertama, santri PP. Sidoresmo akan memilih seorang calon pemimpin dari sudut pandang kadar keislamannya dan juga pencerminan *Islamic value* tersebut dalam segala tingkah lakunya. Sebuah nilai agama bukan hanya sekadar sebagai pengetahuan belaka, lebih jauh juga harus menjadi *spion* dalam melangkah kakinya. Seorang pemimpin juga harus berwatak dan bertabiat yang qur'ani. Seorang pemimpin dengan *basic* keislaman yang mencukupi otomatis akan mampu menjalankan roda pemerintahan secara syar'i.

Kedua, dalam menentukan seorang pemimpin, santri Sidoresmo akan mengukur *kapabilitas manajerial* yang dimiliki seorang calon. karena seorang pemimpin diibaratkan sebagai panglima besar yang membawahi berbagai dimensi keprajuritan. Pemimpin harus mampu mengatur bawahannya agar bawahannya tidak kelimpungan mengatur dirinya sendiri sehingga terwujud keamanan dan keharmonisan dalam hidup berbangsa dan bernegara. seorang pemimpinlah yang akan menentukan pilihan antara

yang *haq* dan yang *bathil*. Jika pemimpinnya hanya mau menang sendiri dan mempunyai keinginan pada dirinya saja, hanya kelihatan pada pandangan pertama saja, maka selanjutnya bisa ditebak hasil yang akan diperoleh. Hanya kebingungan sosial yang berujung pada *chaos* yang berkepanjangan.

Ketiga, santri Sidosesmo ketika harus memilih seorang pemimpin akan menilai tingkat loyalitasnya terhadap negara. Seorang pemimpin pilihan santri harus mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap negara dan rakyat. Loyalitas dalam arti pengabdian yang nyata kepada negara tanpa adanya unsur-unsur komersialisasi jabatan yang nantinya akan berdampak pada banggunya kaum kapitalis birokrat seperti pada era Sukarno dulu yang banyak menimbulkan kemiskinan dan kemelaratan permanen sehingga berakibat munculnya perpecahan yang membawa bangsa ke ambang kehancuran. Namun loyalitas disini tidak diartikan secara over yang akan menyemaikan benih-benih fanatisme berlebihan.

Keempat santri Sidosesmo akan menjatuhkan pilihannya pada figur pemimpin yang mampu mengayomi rakyat, karena Walikota adalah naungan dan tempat bergantung rakyat.

Kelima, ketika santri Sidosesmo memilih seorang pemimpin, tentunya pemimpin yang mampu bersikap adil dan tegas serta berkomitmen ke depan. Adil dalam hal ini adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai, sedangkan tegas adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk berlaku benar secara lugas dan berani untuk mengambil keputusan, tentu keputusan yang didasarkan atas kepentingan umum bukan atas dasar kepentingan pribadi.

"Santri diberikan pembelajaran politik oleh seorang guru biasanya melalui sekolah, seperti pelajaran tata negara dan pengajian kitab Fiqh siyasah dari seorang guru/kyai".³³

³³ Makin (Santri Pondok Yanabiul Ulum Sidosesmo), Wawancara, t.t.

Seorang santri yang mumpuni tidak akan memilih seorang pemimpin dengan sifat dan gaya kepemimpinan yang otokratif, sebab pemerintahan tangan besi dan sewenang-wenang hanya akan menimbulkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan.

Dari poin-poin tersebut di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ketika santri Pondok Pesantren Sidoresmo di hadapkan pada pilihan untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat, santri akan selalu berpegangan pada kriteria-kriteria Islam. Harus disadari memang jika pada akhirnya seorang santri dan pesantren pada umumnya juga mampu untuk merekrut seorang pemimpin (wali kota) yang cakap.

Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Sidoresmo Terhadap Pilwali 2005 di Surabaya dalam Dimensi *Fiqh Siyasah*

Sejak Juni 2005, penyelenggaraan pemerintahan dan politik di tingkat lokal mengalami pergeseran, bahkan perubahan yang luar biasa. Kepala daerah yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung, pada waktu itu juga di pilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pilwali. Rakyat yang sebelumnya hanya menjadi penonton, tiba-tiba berubah menjadi pelaku dan penentu. Anggota DPRD yang sebelumnya memiliki kewenangan besar dalam menentukan pilihan kepala daerah, tiba-tiba hanya duduk manis menjadi penonton di pinggir lapangan.³⁴

Pemilihan kepala daerah (pilwali) 2005 di Surabaya merupakan proses yang dinilai efektif dalam rangka menghasilkan pemimpin daerah. Partisipasi politik santri dalam pilkada mulai hangat disuarakan oleh banyak pihak, sebagian ulama' memandang bahwa hukum turut serta dalam memilih pemimpin adalah wajib. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat tentang kewajiban tersebut; apakah kewajiban mengangkat pemimpin termasuk wajib

³⁴ Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), 1.

yang bersifat 'aqli atau kewajiban yang bersifat syar'i? *Kedua*, Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan umat Islam agar taat kepada-Nya, kepada rasul-Nya, dan kepada pemimpin (*ulul amri*).³⁵ Perintah taat kepada pemimpin secara tidak langsung, adalah perintah agar memiliki pemimpin; dan *ketiga*, hukum mengangkat pemimpin adalah fardu kifayah, laksana jihad dan mencari ilmu. Oleh karena itu, kewajiban itu telah hilang apabila sudah dijalankan oleh yang lain.³⁶ Sikap golput dalam pemilihan pemimpin dihukumi haram. Sedangkan sebagian ulama' lagi, tidak berpendapat demikian.

*"Santri kami beri kebebasan didalam menentukan aspirasi politiknya karena itu adalah hak mereka asal yang terpenting adalah memilih figur seorang pemimpin yang islami"*³⁷

Santri Pondok Pesantren Sidoresmo selalu dididik untuk menuntut (menimba) ilmu kepada seorang kyai yang bertempat tinggal disebuah pondok atau asrama. Santri di dalam dunia pesantren itu dituntut untuk siap menghadapi ujian baik itu jasmani maupun rohani. Karena pada umumnya di dalam sebuah pondok pesantren, banyak peraturan-peraturan yang sangat ketat yang diterapkan bagi semua santri. Akan tetapi ketatnya peraturan di pesantren itu pada dasarnya adalah memberikan pendidikan yang sangat penting bagi seorang santri sebagai bekal menghadapi kehidupannya kelak di kemudian hari, misalnya disiplin terhadap waktu dan shalat berjama'ah.

*"Dalam menentukan aspirasi politiknya Santri masih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya tidak dipaksa untuk memilih salah satu calon partai politik tertentu karena ini sudah zamannya demokrasi"*³⁸

³⁵ sebagaimana perintah dalam QS al-Nisā' (4): 59. Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), 129.

³⁶ Mubarak, *Fiqh Siyashah*, 64–65.

³⁷ KH. Mas Nidhomuddin Tholhah, Wawancara, t.t.

³⁸ Maskur (Guru di PonPes At-Tauhid Sidoresmo), Wawancara, t.t.

Santri Sidoresmo sebagai bagian dari komunitas Islam tradisional memiliki responsibilitas tertentu terhadap perilaku politik lokal di sekelilingnya. Pertama, perilaku santri sangat tergantung dengan pilihan politik kiai. Hal ini berkaitan dengan fungsi *patron-klien* antara kiai-santri. Kedua, perilaku politik santri tidak terikat dengan pilihan politik kiai, hal ini disebabkan adanya anggapan pada santri bahwa mereka memiliki kebebasan pilihan dalam wilayah politik.

Setelah penulis menyebarkan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar keterlibatan santri dalam politik tentang pemberdayaan santri PP. Sidoresmo terhadap afiliasi politik santri tidak ada dampak yang signifikan keterlibatan santri dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari. Dalam kehidupan politik sekarang ini para santri Sidoresmo betul-betul diberdayakan dalam menentukan politiknya dan santri banyak yang berafiliasi politik pada pilwali 2005 di Surabaya dengan cara ikut serta memilih seorang pemimpin Walikota di Surabaya, dan hal itu tidak membawa pengaruh besar terhadap eksistensi seorang santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Sidoresmo.

Penutup

Praktek pemberdayaan politik dan sosialisasi terhadap santri Pondok Pesantren Sidoresmo dalam kaitannya dengan Pilwali 2005 di Surabaya banyak didapat dari pengajian kitab *Fiqh Siyasah*. Dan perilaku santri ditentukan oleh 2 faktor, yaitu *Pertama*, Perilaku santri sangat tergantung dengan pilihan politik kyai karena hubungan patron-klien antara kyai-santri. *Kedua*, perilaku politik santri tidak terikat dengan pilihan politik kyai, hal ini disebabkan adanya anggapan pada santri bahwa mereka memiliki kebebasan pilihan dalam wilayah politik.

Santri Pondok Pesantren Sidoresmo ketika dihadapkan pada pilihan untuk menentukan pemimpin (Walikota), santri akan selalu berpegang pada kriteria-kriteria Islam. Santri PP. Sidoresmo benar-benar

diberdayakan dalam menentukan politik secara bebas dan aktif tanpa ada unsur paksaan sesuai ajaran islam, dimana sebagian ulama' memandang bahwa hukum turut serta dalam memilih pemimpin (Walikota) adalah wajib. Dalam al-Qur'an Allah memerintahkan umat Islam agar taat kepadaNya, kepada Rasul-Nya dan kepada Pemimpin (Ulil Amri). Dan hukum mengangkat pemimpin adalah fardlu kifayah.

Daftar Pustaka

- Asmani, Jamal Ma'mur. *Presiden dan Wakil Rakyat Pilihanku: Visi Kepemimpinan Santri 2004*. Yogyakarta: Qirtas, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3S, 1982.
- Fadeli, Soeleiman, dan Mohammad Subhan. *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Fathuri. "Hubungan Santri dan Kyai." Diakses 20 Juni 2018. <http://islamlib.com/id/index.php?Page=article&id=626>.
- Hamidah, Roikhatul. "Posisi Ulama dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (Desember 2019).
- Hubet, Abdulla. "Peran Politik Perempuan Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Dukun Gresik." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (April 2013).
- Idri. "Sistem Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif Abū al-A'lā al-Maudūdī." *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008).
- KH. Mas Nidhomuddin Tholhah. Wawancara, t.t.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan Publika, 2008.
- Makin (Santri Pondok Yanabiul Ulum Sidoresmo). Wawancara, t.t.
- Makinudin. "Resolusi Jihad di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan dalam Al-Qur'an." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (April 2018).
- Marijan, Kacung. *Demokratisasi di Daerah Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2006.

- . *Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Kittah 1926*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Maskur (Guru di PonPes At-Tauhid Sidoresmo). Wawancara, t.t. Masruhan. "Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara." *Jurnal Al-Qānūn* 12, no. 1 (Juni 2009).
- Moesa, Ali Maschan. "Kiai NU dalam Paradigma Politik Kebangsaan." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 2, no. 1 (April 2012).
- Mubarok, Jaih. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Moral Politik Santri*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- . *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. Yogyakarta: SIPRESS, 1992.
- . "Syahwat Politik Kaum Santri." Diakses 20 Juli 2019. <http://id.shvoong.com/social-sciences/1691896-syahwat-politik-kaum-santri/>.
- Sholihuddin, Muh. "Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyasah KH. Ibrahim Hosen)." *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 1 (Juni 2010).
- Syam, Nur. "Perilaku Politik Santri dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur," 2007. <http://eprints.sunan-ampel.ac.id/20/>.
- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.